

RINGKASAN

Risdawati 200510016 **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)**

(Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H)

Tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi di Kota Lhokseumawe identik dengan kejahatan kesusilaan yang disertai dengan ancaman. Tindakan prostitusi *online* ini semakin marak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan solusi yang harus dilakukan agar kejahatan prostitusi *online* ini dapat diselesaikan. Maka aparat penegak hukum Kota Lhokseumawe sangatlah diperlukan dalam hal melakukan kebijakan melalui hukum pidana dan penegakan hukumnya dalam meminimalisir kejahatan prostitusi *online* berdasarkan hukum pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* serta penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Kota Lhokseumawe.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe, sampel terdiri dari responden dan informan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Kota Lhokseumawe saat ini dengan dilakukannya penutupan lokalisasi prostitusi *online* dan dilakukan rajia ditempat yang dianggap rawan praktik prostitusi *online*. Aparat penegak hukum Kota Lhokseumawe juga melakukan patroli setiap malam mulai dari pukul 21.00-24.00 Wib. Aparat penegak hukum juga melakukan sosialisasi terhadap bahaya prostitusi *online*.

Disarankan kepada aparat penegak hukum Kepolisian Polres Lhokseumawe diharapkan agar lebih memaksimalkan dan meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum Qanun Aceh terhadap tindak pidana prostitusi *online* dengan memberikan sanksi efek jera kepada pelaku . Diharapkan kepada pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe agar dapat memberikan sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mengungkap praktik prostitusi online.

Kata Kunci: Kebijakan hukum, penegakan hukum, Prostitusi *Online*

SUMMARY

Risdawati **LEGAL POLICY ON COMBATING PROSTITUTION**
200510016 **CRIMINAL ACTIONS ON SOCIAL MEDIA (Research**
 Study in Lhokseumawe City)
 (Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

The crime of online prostitution that occurs in Lhokseumawe City is identical to crimes against morality accompanied by threats. This act of online prostitution is increasingly rampant and very disturbing to society in everyday life. A solution is needed so that this crime of online prostitution can be resolved. Therefore, law enforcement officers in Lhokseumawe City are very much needed in terms of implementing policies through criminal law and law enforcement in minimizing online prostitution crimes based on criminal law. The purpose of this study is to determine the criminal law policy on overcoming online prostitution crimes and law enforcement against online prostitution crimes in Lhokseumawe City.

The research method used in this study is empirical juridical. The location of the study is in Lhokseumawe City, the sample consists of respondents and informants. The data sources in this study are primary data and secondary data.

Based on the results of the study, it is known that the criminal law policy against online prostitution crimes in Lhokseumawe City is currently by closing down online prostitution localizations and conducting raids in places considered prone to online prostitution practices. Law enforcement officers in Lhokseumawe City also conduct patrols every night from 21.00-24.00 WIB. Law enforcement officers also conduct socialization of the dangers of online prostitution.

It is suggested to the law enforcement officers of the Lhokseumawe Police to maximize and improve the performance in enforcing the Aceh Qanun law against online prostitution crimes by giving deterrent sanctions to the perpetrators. It is expected that the Lhokseumawe Police can provide socialization and appeals to the community and the community can work together to reveal online prostitution practices.

Keywords: Legal policy, law enforcement, *Online Prostitution*